

Minta Kejati Ambil Alih

Kasus Korupsi

SINGKAWANG -Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Singkawang kembali bakal menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pihak terkait untuk mengusut dugaan penyimpangan dana (korupsi) pada sejumlah proyek yang dibiayai APBNP dan APBD tahun anggaran (TA) 2008-2010 di Kota Singkawang.

Tak hanya itu, LAKI Singkawang juga mendesak agar kasus korupsi Singkawang yang terkesan menguap sejak 2008 langsung ditangani Kejati Kalbar. Alasannya, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan negeri yang telah silih berganti kepemimpinan hingga kini terkesan enggan 'menyentuh' kasus korupsi di daerah ini. Seringkali penanganan kasus-kasus korupsi di daerah ini oleh kejaksaan mengecewakan dan sangat lamban diselidiki. Hal ini dituturkan Mu'in dalam rilisnya kepada Pontianak Post (18/9) sekembalinya dari acara halal bi halal dengan jajaran pengurus LAKI di pusat serta pihak KPK beberapa waktu lalu.

Proyek-proyek yang dinilai sarat penyimpangan di antaranya MTQ Tingkat Provinsi 2008 Rp1.6 miliar, kasus petaksawah di Singkawang Selatan yang dikerjakan Dinas Pertanian dan Kehutanan, bangunan Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Singkawang serta penyimpangan di Dinas BM-SDA dan ESDM Singkawang terkait Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)

Rp10 miliar serta Rp6 miliar yang menggunakan rantai anggaran APBNP ditengarai penuh rekayasa kolusi dan gratifikasi tersebut. Menurut Ketua LAKI Singkawang, sudah seharusnya KPK bersama Kejati Kalbar mengusut dugaan adanya penyimpangan dana dari kasus-kasus yang memakai pos anggaran APBNP, DPID dan APBD di Kota Singkawang tersebut.

Minimal, kata dia, jika KPK dan Kejati turun tangan kasus-kasus dugaan penyimpangan yang dananya bersumber APBD dan APBNP serta DPID bisa terkuak.

"Sehingga bisa jadi jalan pembuka bagi pengungkapan kasus korupsi di Kalbar khususnya," tegas Mu'in yang juga anggota International Force Against Corruption (IFAC) yang beranggotakan lima negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan Filipina ini. Karenanya, lanjut Mu'in, selain Kejati harus mengambil alih, peran KPK juga masih sangat dibutuhkan dalam penuntasan kasus korupsi di daerah. Sementara itu, sebenarnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak sejak 2007 terhadap pengelolaan anggaran di Singkawang ternyata bukan hanya kasus-kasus yang sekarang sedang dibidik LAKI Singkawang. Masih banyak indikasi kerugian negara lain yang terjadi di Singkawang yang jika ditotalkan mempunyai nilai cukup fantastis dan memang masih belum tersentuh. (zrf)